

Fraksi DPRD Bintan Dukung Perubahan Perda RPMJ dan Perda Perangkat Desa



Penyerahan Ranperda RPJMD dan Perangkat Desa, dari Wakil Bupati Bintan kepada Wakil Ketua DPRD Bintan, Trijono



Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda RPJMD dan Ranperda Perangkat Desa, bertempat di gedung DPRD Bintan.



Anggota DPRD Bintan, yang hadir di agenda rapat paripurna

BATAMTODAY.COM, Bintan - Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya seluruh Fraksi di DPRD Bintan mendukung perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang perangkat desa, untuk segera disahkan menjadi Perda Bintan dalam sidang paripurna yang digelar Senin (19/3/2018).

Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan DPRD Bintan dalam pandangan umumnya mengatakan penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan 2005 - 2025 dan memperhatikan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, untuk Perda tentang perangkat desa dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa menjadi ujung tombak pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Sebab keberadaan perangkat desa sebagai aparat pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat punya peran strategis dan penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan," ujar Ketua Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan DPRD Bintan, Drs. Muhammad Zuhdi.

"Kami menyambut baik ranperda ini. Supaya masyarakat pada saat memilih perangkat desa ada payung hukumnya, juga agar aparat desa dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai amanat," ujar Umar.

Sementara Umar Ali Rangkuti dari Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar perangkat desa memperhatikan soal keterwakilan perempuan dalam struktur perangkat desa.

"Ke depan agar diperhatikan keterwakilan perempuan dalam pengangkatan perangkat desa, namun dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitasnya," ujar Umar.

Sementara itu, Suardi dari Fraksi Golkar menyampaikan dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penempatan perangkat desa harus profesional, objektif, bersih dari KKN, memiliki kemampuan serta keahlian sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kinerja perangkat desa tersebut.

"Fraksi Partai Golkar berpendapat agar perangkat desa yang dimaksud poin 1, harus diperjelas dan dipertegas apakah sebagian ataupun semua perangkat desa boleh dijabat oleh PNS. Karena selama ini salah satu jabatan perangkat desa (Sekretaris Desa) ada yang di jabat oleh PNS," ungkapnya.

Sedangkan fraksi Demokrat, Bani Suparti menyampaikan, Ranperda perangkat desa ini sangat penting dan harus segera disahkan. "Perangkat desa yang terpilih harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai mekanisme pengangkatan perangkat desa. Kelengkapan persyaratan administrasi tersebut sesuai dalam pasal 9 ayat 2," ujarnya.

Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam mengharapkan agar usulan ranperda bisa segera dibahas dan disahkan menjadi Perda. Menyinggung soal ranperda tentang perangkat desa, Ia menyampaikan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perangkat desa.

"Namun penjabaran mendetailnya perlu kita lakukan dan sudah kita tuangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perangkat desa. Semoga dewan yang terhormat bisa segera membahas dan mengesahkan menjadi perda," imbuhnya. (*)

Foto : Syajarul Rusydy
Narasi : Syajarul Rusydy
Editor : Yudha



Suasana rapat anggota DPRD Bintan



Para kepala OPD yang hadir di acara rapat paripurna



Para kepala OPD Bintan yang hadir di acara Rapat paripurna di DPRD Bintan



Para kepala OPD Bintan yang hadir di acara rapat paripurna di DPRD Bintan

Abadikan moment spesial Anda di **BATAMTODAY.COM gallery**

untuk pemesanan hubungi:

Telp : (0778) 7482-514

Email : batamtoday@gmail.com